

Membangun Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Syariah

Ristiyanthi Ahmadul Marunta¹, Nurul Arabia², Iftitah Amanah Bachtiar³, Karmilah⁴, Amil Malik⁵

^{2,3,4,5} Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

¹ Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ekonomi syariah dalam membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, dengan menekankan keterkaitan antara prinsip-prinsip Islam dan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan studi pustaka (library research) dengan mengkaji jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan resmi, dan data statistik terkini terkait perkembangan ekonomi nasional dan sektor keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi menunjukkan tren positif, tantangan seperti ketimpangan distribusi pendapatan, keberlanjutan lingkungan, dan transformasi struktural masih memerlukan solusi strategis. Ekonomi syariah, melalui instrumen seperti zakat, wakaf produktif, sukuk hijau, dan pembiayaan mikro syariah, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan. Strategi penguatan regulasi, inovasi instrumen keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan implementasi model ini. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat membentuk perekonomian yang adil, tangguh, dan kompetitif di tingkat global.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic economics in fostering sustainable economic growth in Indonesia, emphasizing the interconnection between Islamic principles and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The method employed is a library research approach, reviewing scholarly journals, books, articles, official reports, and the latest statistical data related to national economic development and the Islamic finance sector. The findings indicate that although Indonesia's post-pandemic economic growth shows a positive trend, challenges such as income inequality, environmental sustainability, and structural transformation still require strategic solutions. Islamic economics, through instruments such as zakat, productive waqf, green sukuk, and Islamic microfinance, holds significant potential to drive inclusive and environmentally friendly growth. Strategies involving regulatory strengthening, financial instrument innovation, utilization of digital technology, and enhancement of Islamic financial literacy and inclusion are key to the successful implementation of this model. This study affirms that integrating Islamic principles with sustainable development policies can create an economy that is fair, resilient, and competitive at the global level.

Keywords: Islamic Economics, Sustainable Economic Development.

✉ Corresponding author :

Email Address : ristiyanti@usimar.ac.id

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu, yang biasanya diukur melalui persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) secara tahunan atau periodik. Di Indonesia, dinamika pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir menunjukkan ketahanan yang cukup baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global, seperti fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim yang memengaruhi rantai pasok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar 5,02%, mencerminkan kondisi perekonomian yang stabil. Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun sempat mengalami perlambatan, tren pertumbuhan kembali menguat dengan capaian 3,70% pada 2021, meningkat menjadi 5,31% pada 2022, dan tetap terjaga pada kisaran 5,05% di tahun 2023. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,03%, dan memasuki tahun 2025, kinerja ekonomi nasional terus menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan sekitar 4,99% pada paruh pertama tahun, serta proyeksi tahunan berada di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Capaian ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia mampu bertahan menghadapi tantangan eksternal, dengan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor sebagai penopang utama.

Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sektor ekonomi syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan. Indonesia saat ini menempati posisi penting di tingkat global sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi syariah, berada di peringkat kedua dunia setelah Malaysia menurut laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Perkembangan ini tidak hanya terbatas pada sektor perbankan syariah, tetapi juga meliputi industri halal, pasar modal syariah, asuransi syariah, keuangan mikro syariah, hingga pariwisata halal. Data menunjukkan bahwa nilai aset perbankan syariah pada akhir 2019 mencapai Rp 524,56 triliun, dan pada kuartal pertama tahun 2025 jumlahnya telah meningkat menjadi sekitar Rp 960,82 triliun, dengan pangsa pasar perbankan syariah mencapai lebih dari 7,7% dari total industri perbankan nasional. Sementara itu, total aset keuangan syariah nasional, termasuk pasar modal syariah dan lembaga keuangan non-bank, mencapai lebih dari Rp 9.529 triliun pada awal 2025, menunjukkan peran yang semakin besar dalam menopang perekonomian nasional. Pasar modal syariah bahkan menyumbang

sekitar 86% dari total aset keuangan syariah, dengan kinerja yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pasar modal konvensional.

Ekonomi syariah sendiri merupakan suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Sistem ini menekankan penerapan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam seluruh aktivitas ekonomi, serta melarang praktik-praktik yang merugikan seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dalam pelaksanaannya, ekonomi

syariah mengedepankan transaksi yang transparan, saling menguntungkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian integral dalam distribusi kekayaan secara merata, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu. Dengan pendekatan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan pendapatan atau akumulasi kekayaan semata, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan umum dan keberlanjutan jangka panjang.

Posisi strategis ekonomi syariah dalam pembangunan nasional semakin diperkuat dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Kebijakan ini diarahkan untuk mengembangkan industri halal yang kompetitif, memperluas akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha, terutama UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi syariah memiliki potensi pasar yang luas dan prospektif. Integrasi prinsip-prinsip syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan juga membuka peluang bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan tangguh, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan perlindungan lingkungan. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi syariah di Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional yang tidak hanya mengedepankan profit, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan keberlanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Sumber data diperoleh dari literatur sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah, laporan pembangunan global, buku-buku akademik, dan publikasi resmi terkait ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan dalam lima tahun terakhir. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan, khususnya yang diusung dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Penekanan analisis diberikan pada

konsep, instrumen, dan tantangan dalam implementasi ekonomi syariah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan cerminan kemampuan negara untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ukuran utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan (year-on-year), meskipun mengalami penurunan 0,98% secara triwulanan (quarter-to-quarter). Namun, pada kuartal II-2025, perekonomian mengalami percepatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan 5,12% (y-on-y) dan 4,04% (q-to-q), sehingga secara kumulatif semester I-2025 mencatat pertumbuhan 4,99% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Lembaga internasional seperti IMF, OECD, dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2025 akan berada pada kisaran 4,7%–4,8%. Proyeksi ini menunjukkan stabilitas yang cukup kuat, terlebih di tengah perlambatan ekonomi global akibat penurunan harga komoditas, ketidakpastian geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar. World Bank dalam rilis terbarunya menekankan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia didorong oleh kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif, inflasi yang relatif terkendali, serta dorongan investasi publik dan swasta, khususnya di bidang infrastruktur dan energi terbarukan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan, menyumbang lebih dari 50% PDB. Namun, pertumbuhannya mulai melambat akibat tekanan biaya hidup dan perlambatan pendapatan riil masyarakat di beberapa wilayah. Pemerintah merespons dengan mengucurkan stimulus fiskal senilai Rp24–44 triliun untuk memperkuat daya beli dan mendorong belanja domestik. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) juga menunjukkan perbaikan, terutama pada sektor manufaktur, konstruksi, dan infrastruktur transportasi, yang diharapkan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas nasional.

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Indonesia menunjukkan pergeseran berkelanjutan. Sektor jasa kini menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB, mencakup perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Industri pengolahan tetap menjadi pilar penting, namun kontribusinya terhadap PDB relatif stagnan dalam satu dekade terakhir, sehingga agenda reindustrialisasi menjadi prioritas. Pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri berbasis teknologi, serta

transisi menuju manufaktur ramah lingkungan. Sektor pertanian, meskipun kontribusinya menurun secara persentase, tetap berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan menopang perekonomian di wilayah pedesaan.

Faktor demografi menjadi salah satu penopang potensial pertumbuhan jangka menengah. Dengan bonus demografi yang akan berlangsung hingga 2030-an, Indonesia memiliki peluang untuk mempercepat pertumbuhan jika mampu meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan literasi keuangan penduduk usia produktif. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, bonus demografi dapat berubah menjadi beban demografi akibat meningkatnya pengangguran dan ketimpangan.

Dari perspektif eksternal, kinerja ekspor Indonesia pada 2025 masih menghadapi tantangan akibat moderasi permintaan global dan fluktuasi harga komoditas unggulan seperti batubara, kelapa sawit, dan karet. Untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, strategi diversifikasi produk ekspor dengan meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan industri terus digenjut. Selain itu, integrasi dalam rantai pasok global melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia.

Dari sisi pembiayaan pembangunan, inovasi pendanaan publik seperti *sovereign wealth fund* Danantara menjadi salah satu instrumen strategis dalam menarik investasi jangka panjang ke sektor-sektor prioritas. Pendanaan ini diarahkan pada proyek-proyek dengan tingkat pengembalian ekonomi tinggi, seperti energi terbarukan, digitalisasi infrastruktur, dan pembangunan kawasan industri terpadu.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 masih berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN besar seperti Thailand dan Malaysia, namun sedikit di bawah Vietnam dan Filipina yang tumbuh di atas 5,5%. Keunggulan Indonesia terletak pada pasar domestik yang besar, stabilitas politik relatif terjaga, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, daya saing global masih perlu diperkuat, terutama pada aspek efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, dan percepatan adopsi teknologi.

Dalam kerangka keberlanjutan, pemerintah semakin menekankan pentingnya pertumbuhan berkualitas yang tidak hanya mengejar angka PDB, tetapi juga memperhatikan pemerataan, keberlanjutan lingkungan, dan pengurangan kemiskinan. Penerapan *green economy* melalui insentif pajak bagi industri ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan, dan pembatasan emisi karbon menjadi bagian dari strategi nasional.

Dengan landasan kebijakan yang konsisten, penguatan sektor riil, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5% dalam jangka menengah. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah, dunia usaha,

dan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan global, mengelola risiko, serta memanfaatkan peluang ekonomi baru di era digital dan transisi energi. Sebagaimana pesan dalam Al-Qur'an:

وَاَنْتَعِمُوا فِي مَا آتَاكُمُ اللَّهُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
وَاَنْتَعِمُوا فِي مَا آتَاكُمُ اللَّهُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash: 77)

Ayat ini mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi haruslah seimbang antara pencapaian material dan keberlanjutan moral-spiritual, sehingga pertumbuhan yang dicapai benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Ekonomi Syariah sebagai Tonggak Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang memadukan antara pencapaian kesejahteraan material dan keberlanjutan moral-spiritual. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ekonomi syariah memiliki posisi strategis karena menawarkan paradigma yang tidak hanya mengejar pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mengintegrasikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keseimbangan distribusi kekayaan.

- a. Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan
Ekonomi syariah mempromosikan prinsip larangan riba, transaksi spekulatif (gharar), dan praktik perjudian (maysir), sehingga kegiatan ekonomi terhindar dari ketidakpastian berlebihan dan risiko moral hazard yang tinggi. Instrumen-instrumen keuangan syariah seperti perbankan syariah, zakat, wakaf produktif, sukuk hijau, dan pembiayaan mikro berbasis murabahah atau mudharabah telah terbukti berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan.

Data dari Global Islamic Economy Indicator menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam pengembangan sektor ekonomi syariah pada tahun 2023, di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Capaian ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sektor alternatif, melainkan telah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB, khususnya dari sektor makanan halal, keuangan syariah, dan pariwisata ramah Muslim.

- b. Ekonomi Syariah dan Keseimbangan Sosial

Salah satu ciri penting ekonomi syariah adalah mekanisme distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Zakat, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen fiskal yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa distribusi zakat yang terkelola secara efektif mampu meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik hingga 13% dalam setahun. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

wa aqîmush-shalâta wa âtuz-zakâta wa athî'ur-rasûla la'allakum tur-hamûn.

Artinya: “Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.” (QS. An-Nur: 56) Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan bagian integral dari ibadah sekaligus instrumen sosial-ekonomi yang mampu menciptakan keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, konsep wakaf produktif telah berkembang pesat dan menjadi pilar penting dalam pembiayaan proyek-proyek sosial dan lingkungan. Misalnya, pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan usaha mikro melalui hasil pengelolaan aset wakaf menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan secara finansial dan sosial tanpa membebani anggaran negara.

c. Keterkaitan Ekonomi Syariah dengan SDGs

Konsep pembangunan berkelanjutan berbasis syariah memiliki irisan yang kuat dengan 17 tujuan SDGs. Instrumen seperti green sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sejak 2018 menjadi bukti nyata integrasi prinsip syariah dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Pendapatan dari sukuk hijau digunakan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan air, dan adaptasi perubahan iklim, yang selaras dengan tujuan SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Penerapan prinsip syariah juga mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui pengembangan industri halal dan UMKM syariah, yang mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menjaga standar etika bisnis.

3. Membangun Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Syariah

Pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah menuntut sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi sektor swasta, inovasi lembaga keuangan syariah, serta kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Konsep ini menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari pertumbuhan, di mana stabilitas jangka panjang menjadi tujuan utama dibandingkan hanya mengejar pertumbuhan kuantitatif jangka pendek.

a. Strategi Implementasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Syariah

Strategi pembangunan ekonomi berbasis syariah dapat diarahkan pada tiga pilar utama: (1) penguatan regulasi dan kebijakan pro-syariah; (2) pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif; dan (3) pemberdayaan sektor riil melalui dukungan ekosistem syariah.

Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan diperlukan untuk memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Regulasi yang jelas terkait perbankan syariah, sukuk, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah akan mempercepat penetrasi pasar. Misalnya, penerbitan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 menjadi tonggak penting dalam memberikan arah strategis pengembangan ekonomi syariah nasional.

Kedua, pengembangan instrumen keuangan syariah perlu diarahkan untuk mendukung pembiayaan yang inklusif dan ramah lingkungan. Contoh nyata adalah penerbitan green sukuk oleh pemerintah Indonesia yang menjadi instrumen pembiayaan proyek ramah lingkungan sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon. Selain itu, inovasi seperti digital wakaf platform dan crowdfunding syariah dapat memperluas partisipasi publik dalam pembiayaan sosial produktif.

Ketiga, pemberdayaan sektor riil melalui integrasi dengan ekosistem syariah sangat penting, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan industri halal. Dengan memanfaatkan pembiayaan mikro syariah (microfinance), pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha tanpa terjerat riba dan praktik spekulatif yang berisiko tinggi.

b. Inovasi Pembiayaan dan Teknologi dalam Ekonomi Syariah

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan pada mekanisme pembiayaan syariah. Perbankan dan fintech syariah kini memanfaatkan teknologi blockchain, smart contract, dan artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi, keamanan transaksi, dan transparansi.

Contohnya, beberapa platform fintech syariah di Indonesia telah mengimplementasikan pembiayaan berbasis peer-to-peer lending yang sesuai prinsip syariah, sehingga memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau bank konvensional. Selain itu, penerapan digital sukuk dan online zakat payment turut mempercepat

aliran dana sosial dan investasi produktif.

c. Peran Lembaga Keuangan dan Pemerintah

Lembaga keuangan syariah berperan strategis dalam mendukung ekonomi berkelanjutan melalui pembiayaan sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah. Di sisi lain, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, pembebasan pajak tertentu, dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan berbasis syariah.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan nasional terintegrasi dengan strategi ekonomi syariah. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penguatan daya saing ekonomi nasional di pasar global.

d. Tantangan dan Rekomendasi

Meski potensinya besar, pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- 1) Literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 9,1 %, jauh di bawah literasi keuangan umum yang mencapai 49,68%.
- 2) Keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil yang menghambat penetrasi layanan keuangan syariah.
- 3) Kurangnya riset dan pengembangan produk inovatif di sektor keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan.

Rekomendasi yang dapat diambil mencakup:

- 1) Meningkatkan edukasi publik mengenai produk dan layanan keuangan syariah melalui kampanye nasional yang masif.
- 2) Memperluas akses digital dan teknologi keuangan ke seluruh pelosok negeri.
- 3) Mendorong kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, dan pemerintah untuk mengembangkan inovasi keuangan berkelanjutan berbasis syariah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus mencerminkan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan yang menjadi ciri khas ekonomi syariah.

SIMPULAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan. Prinsip-prinsip

syariah yang menolak riba, gharar, dan maysir mampu memberikan fondasi moral dan etika bagi aktivitas ekonomi, sekaligus mendorong pemerataan distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, wakaf produktif, sukuk hijau, dan pembiayaan mikro syariah. Penerapan ekonomi syariah juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan, penyediaan pekerjaan layak, dan pelestarian lingkungan.

Dengan dukungan regulasi yang konsisten, inovasi instrumen keuangan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, potensi ekonomi syariah dapat dioptimalkan sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia sekaligus model pembangunan berkelanjutan yang diakui secara global.

Referensi :

- Adin, M. S., Fadhiil, I., Sahaf, S. A., & Marwono, W. T. (2023). *Strategi Pembangunan ekonomi Islam*.
- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626-637.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Quarterly Gross Domestic Product of Indonesia 2020–2024*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Gross Domestic Product of Indonesia by Expenditure, 2020–2024*. BPS.
- Chapra, M. U. (2019). *Islam and the Economic Challenge*. London: Islamic Foundation.
- Farooq, M. O., & El-Ashker, A. A. (2019). Sustainable Development in Islamic Economics: An Overview. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 9(1), 17–34.
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, F., ... & Wardhana, D. H. A. (2024). *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irawan, Feri, Meci Nilam Sari, Miftakhul Huda, Mega Ilhamiwati, Parju, Desy Rahmawati Anwar, Ristiyanti Ahmadul Marunta, M. Dzul Fadli, Abd. Rizal,

- Rahmadi, Nurchayati, I Wayan Ruspendi Junaedi, dan Aprih Santoso. 2025. *Ekonomi Syariah: Teori & Aplikasi Ekonomi Islam*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). *Islamic Financial Services Industry (IFSI) Stability Report 2023*. IFSB. [ifsb.org](https://www.ifsb.org)
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethics and Finance: An Islamic Perspective*. Washington D.C.: IMF Publications.
- KNEKS / Bappenas. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024*. KNEKS / Bappenas. kneks.go.id+1
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. KNEKS. kneks.go.id
- Kurniawan, F. (2023). Zakat dan Wakaf Produktif sebagai Instrumen Redistribusi Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(1), 65–80.
- Masyita, D., & Ahmed, H. (2018). Why Islamic Microfinance Institutions Fail: A Case Study of Indonesia. *Humanomics*, 34(2), 230–245.
- Ministry of Finance, Republic of Indonesia. *Green Bond and Green Sukuk Framework / Reports (Indonesia)*. Kemenkeu (Green Sukuk framework & allocation reports). api-djppr.kemenkeu.go.id/dukifc.com
- Nugroho, L. & Rohman, A. (2022). Green Sukuk dan Pembiayaan Berkelanjutan: Studi Literatur. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 121–135.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 – Booklet / Laporan Pelaksanaan*. OJK. ojk.go.id/snki.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Indonesian Islamic Financial Development Report (LPKSI) 2023*. OJK. ojk.go.id/ojk.go.id
- Perdana, M. A. C., & Rosi, A. I. (2023). *BUKU AJAR EKONOMI PEMBANGUNAN DAERAH: Dinamika Ekonomi Pembangunan Daerah; Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Qotrunada, A., Fadhilah, F., & Selasi, D. (2024). Peran Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 6(03), 101-115.
- Sahrudin, A. (2025). Ekonomi Syariah dan Tantangan Globalisasi dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 520-524.
- Setiawan, D. & Zakaria, R. (2023). Ekonomi Hijau dalam Perspektif Syariah: Strategi dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(3), 221–238.
- Soehardi, D. V. L. (2022). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy.

- Wardhono, A., Indrawati, Y., & Qori'ah, C. G. (2018). *Inklusi keuangan dalam persimpangan kohesi sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan*. Pustaka Abadi.
- Yusuf, M. Y. (2022). *Buku: Pengelolaan wakaf untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan*. Ar-Raniry Press.